

2. Neo Klasik

Aliran ini dihubungkan dengan tradisi utama dalam studi gerakan sosial lama, yang kebanyakan dipublikasikan setelah tahun 1950-an. Tradisi ini dibagi lagi dalam dua model studi gerakan sosial lama yang berbeda, yaitu fungsionalis dan model dialektika Marxis.

3. Kontemporer atau Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*)

Tidak sebagaimana gerakan sosial lama (klasik dan neo klasik). Orientasi gerakan ini tidak meliputi diskursus ideologi yang mempertanyakan anti kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas. Pada dasarnya Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) tidak tertarik untuk mempertanyakan ide revolusi. Paradigma ideologi dan orientasi Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) lebih menonjolkan pluralitas, yang ditunjukkan secara beragam melalui isu anti rasis, anti nuklir, pelucutan senjata, feminisme, lingkungan, regionalisme dan etnisitas, kemerdekaan sipil, kebebasan individu dan perdamaian

Gerakan sosial baru (*New Social Movement*) pendekatan teoritisnya meliputi antara lain: Pertama, Teori Mobilisasi Sumber Daya (*The Resource Mobilization Theory*) dan Kedua adalah Teori Identitas (*The Identity Oriented Theory*). Menurut Aberle, Cameron, dan Blumer mengelompokkan tipe gerakan sosial didasarkan dalam beberapa aspek, yakni berdasarkan aspek tujuan gerakan dan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan. Blumer mengelompokkan gerakan sosial menjadi dua tipe yakni: (1) gerakan sosial umum dan (2) gerakan sosial khusus. Seangkan berdasarkan dimensi sasaran perubahan dan dimensi jumlah besrannya maka gerakan sosial dikelompokkan menjadi empat tipe yakni

posisi Negara kemudian menggantikannya dengan kekuatan proletar. Namun dalam gerakan sosial baru, mereka memposisikannya sebagai partner pemerintah atau Negara untuk menciptakan kehidupan baru yang lebih baik.

2. Taktik dan pengorganisasian, Gerakan sosial baru umumnya tidak lagi mengikuti pengorganisasian seperti serikat buruh, atau model politik kepartaian lebih memilih saluran di luar politik normal dan menerapkan taktik yang mengganggu dari mobilisasi opini publik untuk mendapatkan daya tawar politik serta cenderung menggunakan demonstrasi yang amat dramatis.
3. Partisipan atau aktor, menurut Pichardo partisipan gerakan sosial baru muncul dari kalangan kelas menengah baru yang bekerja di sektor ekonomi non produktif umumnya adalah kaum terdidik.
4. Medan atau area, merupakan lintasan batas regional, dari arah lokal sampai internasional. Strategi dan cara mobilisasi bersifat global.

Gerakan sosial baru tidak melibatkan diri dalam politik, atau menghindar menjadi dilembagakan sendiri. Beberapa gerakan sosial baru terintegrasi ke dalam sistem partai dan memperoleh akses reguler terhadap regulasi, implementasi, dan pengambilan keputusan. Seperti di beberapa partai-partai hijau yang menonjol di Eropa dengan beberapa memiliki manifest lokal di beberapa tempat. Dengan demikian paradigma gerakan sosial baru, mengakui tidak ada gaya taktik yang khas dari gerakan sosial baru lebih sekedar opini publik dan politik anti institusi.

Paradigma teori Identitas (*the Identity-Oriented Theory*), meskipun meletakkan pembahasan ke dalam pertanyaan-pertanyaan tentang solidaritas dan integrasi. Menurut pandangan teori ini, baik konsep Durkhemian tentang anomie dan gangguan (*anomie and breakdown*) atau pandangan Smelserian tentang ketegangan (*strain*), arus pendek”korsleting” (*short-circuiting*), keyakinan umum (*generalized beliefs*), dan sebagainya, dianggap kurang relevan untuk menjelaskan tentang perilaku kolektif (*collective behavior*). Penyimpangan social (*social aberration*), sebagai gagasan tentang anomie atau gangguan social (*anomie or social breakdown*), tidak bisa dijadikan jendela dalam memandang berbagai dimensi tentang gerakan social.

Para pendukung teori Identitas, meskipun sementara mereka menerima beberapa elemen repertoar dari teori Marxist seperti gagasan tentang perjuangan (*struggle*), mobilisasi (*mobilization*), kesadaran (*consciousness*), dan solidaritas (*solidarity*), namun mereka menolak tesis reduksionisme dan deterministik materialisme dan konsep-konsep basis materialistik tentang formasi sosial (*social formation*). Determinisme Marxist, dan konsekuensi yang menyangkut reduksionisme, ditinggalkan karena terkesan berlebih-lebihan. Formasi-formasi sosial baru (*new social formations*) dan Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) seperti ekologi (*ecology*), feminisme (*feminism*), perdamaian (*peace*) dan mobilisasi akar rumput (*grassroots mobilisation*) melampaui ide tentang kelas dan melewati batas kondisi material.⁷

⁷ Sukmana, Oman. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing hal 143.

B. Konsep Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Istilah *Civil Society* atau sering juga diterjemahkan dengan masyarakat sipil, Sebagai sebuah konsep, *civil society* juga dapat dipahami dari latar belakang sejarahnya. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero yang memulai menggunakan istilah *societes civilis* dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian *Civil Society* dianggap sama dengan pengertian negara (*the state*), yakni suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Jadi istilah istilah seperti *koinonia politike*, *societas civilis*, *societe civile*, *buergerliche gesellschaft*, *civil society*, dan *societa civile* dipakai secara bergantian dengan polis, *civitas*, *etat*, *staat*, *state*, dan *stato*. Maka ketika JJ Rousseau menggunakan istilah *societes civile*, ia memahaminya sebagai negara yang mana salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan para anggotanya.

Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan *civil society* kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat Pencerahan (*Enlightenment*) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong terusnya rezim rezim *absolut*. Para pemikir politik yang mempelopori pembedaan ini antara lain para filsuf pencerahan Skotlandia yang dimotori oleh Adam Ferguson dan beberapa pemikir

Konsep mengenai *Civil Society* sendiri dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial atau masyarakat yang memiliki peradaban (*civilization*) dimana didalamnya terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan berdasarkan berbagai ikatan yang sifatnya independen terhadap negara. Kegiatan masyarakat sepenuhnya bersumber dari masyarakat itu sendiri, sedangkan negara hanya merupakan fasilitator. Akses masyarakat terhadap lembaga negara dijamin dalam *Civil Society*, artinya individu dapat melakukan partisipasi politik secara bebas. Warga Negara bebas mengembangkan dirinya secara maksimal dan leluasa dalam segala aspek kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya.²⁰

Menurut Einstadt dalam Afan Gaffar *Civil Society* memiliki empat komponen sebagai syarat; pertama Otonomi, kedua akses masyarakat terhadap lembaga Negara, ketiga arena publik yang bersifat otonom dan keempat arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, *Civil Society* mempersyaratkan adanya organisasi sosial politik dan kelompok kepentingan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Diantara organisasi sosial dan politik yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi adalah LSM dan media massa. LSM memiliki tingkat keleluasaan bergerak,

²⁰ Natapraja, Ageng, "*Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobogan*" Tesis, Program Study Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, tahun 2009. Hal 15.

Organisasi Non Pemerintah (*Ornop*) dapat dikatakan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *Non Government Organization* atau yang lebih dikenal dengan *NGO*. Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sebagai berikut :

1. Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun Negara.
2. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*nirlaba*).
3. Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi.

Sebagaimana diketahui dari kesejarahan bangsa-bangsa yang telah maju dan demokratis, keberadaan *Civil Society* yang kuat merupakan salah satu landasan pokok bagi ditegakkannya sistem politik demokrasi. *Civil Society* di sini didefinisikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswadayaan, keswasembadaan dan kemandirian berhadapan dengan negara.

Dengan tumbuh dan berkembangnya *Civil Society* yang kuat maka dimungkinkan pencegahan terhadap dampak-dampak negatif dari dua kekuatan tersebut sehingga kehidupan demokratis rakyat tetap terjaga. Dari pihak negara, kemungkinan monopoli atau dominasinya akan mengakibatkan hilangnya

4. Tiga prinsip utama inilah merupakan konsepsi yang mewakili makna dari pusat Politik Hijau. Prinsip ini digunakan sebagai sarana untuk menjelaskan konsepsi dari teori hijau.

Politik Hijau menawarkan konsep desentralisasi sebagai implementasi kontrol yang lebih baik dalam mengatasi kontrol level global dapat lebih efektif dilaksanakan dalam skala yang lebih kecil, yakni skala komunitas lokal yang langsung memiliki interdependensi terhadap alam sekitar dalam kehidupan mereka. Dengan konsep itu, selama beberapa tahun terakhir ini, keberadaan green politics bisa membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pro lingkungan.

Gerakan lingkungan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk aksi kesadaran manusia yang peduli terhadap kerusakan lingkungan, serta berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang terancam akibat kerusakan lingkungan. Dua terminologi yang erat kaitannya dengan gerakan lingkungan adalah konservasi dan “gerakan hijau” (*Green movement*). Teori Politik Hijau (*Green political theory*) adalah khusus diambil dari fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam yang memiliki implikasi bagi teori politik.

Dengan demikian manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang rasional (seperti dalam pandangan liberalism) atau sebagai makhluk sosial (seperti pandangan sosialisisme) akan tetapi sebagai natural beings, dan lebih jauh sebagai political animals. Sedangkan perlu untuk membedakan antara green politics dan *environmentalism*. *Environmentalists* menerima kerangka kerja yang ada dalam

